

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negeri Belanda merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Barat. Negeri ini menganut sistem pemerintahan monarki parlementer yaitu bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang Perdana Menteri dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. dengan Ratuinya bernama Beatrix dan Perdana Menternya bernama Jan Peter Balkenende yang menjabat sejak tahun 2002 hingga sekarang. Belanda merupakan salah satu negara dengan populasi terpadat di dunia dengan jumlah penduduk 16.622. 025 pada tahun 2010<sup>1</sup>, dengan luas 41, 528 Km<sup>2</sup> dan kebanyakan tanahnya berada di bawah permukaan laut. Belanda juga terkenal dengan *dijk* (tanggul), kincir angin, terompah kayu, tulip dan sifat terbuka masyarakatnya<sup>2</sup>. Sifat liberalnya menjadi sebutan masyarakat internasional. Belanda juga menjadi tempat kedudukan Mahkamah Internasional. Amsterdam merupakan ibu kota kerajaan Belanda dan Den Haag sebagai pusat administrasi dan pemerintahan<sup>3</sup>.

Belanda merupakan negara yang terbuka terhadap kedatangan kaum imigran dari berbagai negara di dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, negeri Belanda telah berkembang menjadi negara dengan masyarakat multi-kultural<sup>4</sup>. Sebagai negara yang memberikan toleransi besar terhadap kedatangan kaum imigran, negeri Belanda memperbolehkan kaum imigran tersebut untuk tetap memelihara kebudayaan mereka

---

<sup>1</sup> *The Netherlands country profile*, [http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country\\_profiles/1043423.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1043423.stm), diakses pada tanggal 7 Juli 2010 pukul 02.37 WIB

<sup>2</sup> Ministry Of Foreign Affairs, International Information And Communication Division (DVL/VB), *Focus On The Netherlands*, The Hague, The Netherlands: 2004, al. 9

<sup>3</sup> *The World factbook: Netherlands*, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.html>, diakses pada tanggal 17 Februari 2010, pukul 02.00 WIB

<sup>4</sup> Ministry Of Foreign Affairs, International Information And Communication Division (DVL/VB), *Focus On The Netherlands, Ibid*, hal. 18

sendiri seperti agama, bahasa dan kebudayaan. Namun kebebasan yang diberikan tersebut menjadi masalah di Belanda.

Jumlah imigran menimbulkan masalah di Belanda, kasus demi kasus yang ditimbulkan oleh kaum imigran mulai terjadi di negara tersebut. Kasus imigran di Belanda yang meningkat eskalasinya ditandai dengan ekspansi imigran yang berasal dari negara-negara Islam. Pemandangan wanita yang memakai jilbab di berbagai kota besar di negeri Belanda bukanlah hal yang aneh. Dari 15,6 juta penduduk Belanda, sekitar satu juta di antaranya adalah muslim atau 4 persen dari seluruh penduduk.

Arus besar kedatangan imigran dari negara-negara Islam di Belanda bisa dirunut dari tahun 1960-an, ketika pemerintah Belanda mendatangkan tenaga asing, yang kebanyakan berasal dari kawasan mediteranian karena di Belanda pada saat itu kekurangan tenaga kerja. Pada waktu itu negeri Belanda mulai mendatangkan tenaga kerja yang berasal dari beberapa negara seperti Italia (1960), Spanyol (1961), Portugal (1963), Turki (1964), Yunani (1966), Maroko (1969), Yugoslavia (1970), Tunisia dan Pakistan untuk memenuhi kebutuhan negeri tersebut akan tenaga kerja<sup>5</sup>.

Setelah krisis fiskal yang terjadi pada tahun 1973, angka pengangguran di Belanda meningkat tajam. Krisis ini juga menyebabkan negeri Belanda berhenti melakukan “impor” tenaga kerja. Namun para pekerja yang berasal dari negara-negara Islam yang sebelumnya didatangkan hanya untuk tinggal selama masa bekerja mereka, banyak yang memilih untuk tetap tinggal di Belanda dan melakukan reuni keluarga<sup>6</sup>.

Reunifikasi keluarga yang dilakukan oleh kaum imigran dari negara-negara Islam yang datang pada tahun 1960-an bertambah banyak dan membentuk warna baru di Belanda. Para imigran yang datang ke Belanda pada tahun 1980-an tidak lagi hanya sebatas pekerja kontrak tetapi juga para pencari suaka. Para pencari suaka ini

---

<sup>5</sup> *Polycymaking related to immigration and integration; The Dutch Case*, <http://www.imiscoe.org/publications/workingpapers/documents/IntegrationPolycymakingDutchcase.pdf>, diakses pada tanggal 3 Maret 2010 pukul 01.04 WIB.

<sup>6</sup> Reuni keluarga yang dimaksud adalah para imigran yang memutuskan untuk tetap tinggal di Belanda tersebut membawa keluarganya dari negara asal mereka untuk tinggal bersama di negeri tersebut.

datang dengan berbagai alasan seperti keadaan politik yang tidak stabil di negara asalnya, terjadinya konflik yang tidak kunjung selesai, rezim yang otoriter dan sebagainya.

Memasuki tahun 1990-an keberadaan imigran asal negara Islam tersebut mulai menimbulkan pro dan kontra, salah satu penyebab buruknya citra Islam di Belanda adalah adanya anggapan bahwa Islam adalah agama dan budaya yang rendah dan tidak sejajar dengan kebudayaan bangsa Eropa. Seorang politikus Belanda, Frits Bolkestein yang menyatakan bahwa agama Islam merupakan agama yang sering melakukan pelecehan terhadap kaum wanita, selain itu pemerintahan di negara-negara Islam menerapkan sistem yang otoriter dan membatasi kebebasan penduduknya untuk berbicara dan berpendapat<sup>7</sup>.

Pernyataan Frits Bolkestein tersebut mendapat dukungan dari tokoh-tokoh ternama di Belanda seperti Paul Scheffer dan Ayaan Hirsi Ali yang memiliki pendapat yang hampir sama dengan Bolkestein. Keadaan pun semakin memanas ketika masyarakat muslim di Belanda juga mengeluarkan komentar-komentar yang menyindir bangsa Belanda sebagai bangsa yang tak beradab dan masyarakat muslim tersebut juga melakukan penghinaan terhadap kaum pecinta sesama jenis di Belanda. Artikel-artikel yang diskriminatif atau saling ejek antara *Allochtonen* dengan *Autochtonen* juga keluar di sejumlah situs internet interaktif dan forum diskusi online<sup>8</sup>.

Di negara Belanda sendiri terdapat dua sebutan bagi masyarakat barat dengan non-barat yang tinggal di Belanda yaitu *Allochtonen* dan *Autochtonen*. Menurut *Centraal Bureau voor de Statistiek* (CBS)<sup>9</sup>, *Allochtonen* adalah sebutan bagi

---

<sup>7</sup> *De Integratie Van Minderheden*, <http://www.fritsbolkestein.com/site/references#this>, diakses pada tanggal 15 April 2010 pukul 02.06 WIB

<sup>8</sup> Institute for Multicultural Development, *Factbook. The position of muslims in The Netherlands*, Utrecht, The Netherlands, 2008, dari alamat <http://www.forum.nl/pdf/factbook-islam-en.pdf>, Hal. 30 diakses pada tanggal 13 April 2010 pukul 23.59 WIB

<sup>9</sup> *Centraal Bureau Voor De Statistiek* (CBS) adalah badan yang bergerak di bidang pengumpulan, pengolahan dan publikasi statistik untuk pemerintah. Organisasi ini didirikan pada tahun 1899 dan semenjak tahun 2004 berdiri secara independen setelah sebelumnya berada dibawah menteri

masyarakat Belanda dengan latar belakang imigran non-barat, CBS mengkategorikan latar belakang non-barat tersebut sebagai masyarakat yang memiliki keturunan Maroko, Antillen Belanda, Aruba, Suriname, Turki dan lainnya. Sedangkan sebutan *Autochtonen* merupakan sebutan bagi seseorang yang kedua orang tuanya telah lahir dan besar di Belanda serta menganut gaya hidup dan cara berpikir seperti kebanyakan orang Eropa/barat atau masyarakat dengan latar belakang imigran barat<sup>10</sup>.

Beberapa kasus yang terkait dengan *Allochtonen* adalah kasus pembunuhan seorang sutradara film, penulis skenario, kolumnis dan pembuat program televisi yang terkenal kontroversial di Belanda, Theo Van Gogh. Van Gogh sering kali terlibat dengan sejumlah gugatan publik dan masalah-masalah dengan tokoh-tokoh masyarakat di Belanda. Van Gogh juga memiliki pandangan negatif terhadap agama Islam. Van Gogh menganggap Islam sebagai “pemeriksa kambing” dan sebuah bentuk kolonisasi baru<sup>11</sup>.

Pada tanggal 2 November 2004 Van Gogh ditemukan tewas terbunuh oleh Mohammed Bouyeri, seorang warga keturunan Maroko yang menganut ajaran Islam Fundamentalis<sup>12</sup>. Van Gogh dibunuh di depan kantor Amsterdam East di sudut jalan Linnaeusstraat dan Mauritskade<sup>13</sup>. Dia telah ditikam dan ditembak sebanyak tujuh kali dan langsung meninggal. Motif dari pembunuhan tersebut adalah Van Gogh bersama dengan Ayaan Hirsi Ali pernah membuat sebuah film pendek yang diberi judul *submission*. Film tersebut mengundang reaksi keras dari kalangan umat Islam di Belanda karena film tersebut memperlihatkan adegan-adegan tentang penderitaan kaum perempuan dalam dunia Islam seperti adegan wanita yang dipukul karena tidak patuh pada suaminya dan wanita yang dipaksa menikah dengan lelaki

---

perekonomian. Dikutip dari <http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/organisatie/geschiedenis/default.htm>, diakses pada tanggal 30 Juni 2010 pukul 22.19 WIB

<sup>10</sup> *Allochtonen*, <http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/dossiers/allochtonen/cijfers/extra/aandeel-allochtonen.htm>, diakses pada tanggal 30 Juni 2010 pukul 22.14 WIB

<sup>11</sup> Dick Douwes, Martijn De Koning, Welmoet Boender (Red.), *Nederlandse Moslims; Van Migrant Tot Burger*. Amsterdam University Press. Salome. Amsterdam: 2005, hal. 151

<sup>12</sup> *Posts Tagged 'Mohammed Bouyeri'*, <http://www.thehollandbureau.com/tag/mohammed-bouyeri/>, diakses pada tanggal 29 Juni 2010 pukul 01.18 WIB

<sup>13</sup> Dick Douwes, Martijn De Koning, Welmoet Boender (Red.), *Ibid*, hal. 9

yang tidak dicintainya<sup>14</sup>. Kematian Van Gogh tersebut memicu kebencian terhadap umat Islam di Belanda. Pada tahun 2004 hingga 2005 tercatat sekitar 20 institusi Islam dirusak termasuk sekolah-sekolah Islam di negara tersebut<sup>15</sup>.

Pembunuhan Van Gogh bukan peristiwa pembunuhan pertama. Wilhelmus Simon Petrus Fortuijn atau yang lebih dikenal dengan nama Pim Fortuyn juga merupakan tokoh yang terbunuh karena pandangannya yang buruk terhadap umat muslim. Pim Fortuyn adalah seorang politikus Belanda yang terkenal kontroversial. Dia mendukung sepenuhnya praktek *Euthanasia*<sup>16</sup>, pernikahan sejenis dan peredaran obat-obatan terlarang di Belanda<sup>17</sup>. Fortuyn memandang Islam sebagai agama yang terbelakang dan mendukung kebijakan imigrasi yang ketat bagi imigran yang berasal dari negara-negara Islam atau pencari suaka yang ingin datang ke Belanda. Fortuyn tewas terbunuh pada tanggal 6 Mei 2002. Dia ditembak oleh seorang aktivis perlindungan hewan dan lingkungan, Volkert Van Der Graaf. Van Der Graaf terkenal sebagai aktivis yang sangat aktif dalam memperjuangkan hak-hak kaum minoritas atau dalam hal ini adalah kaum peternak babi, sapi dan ayam yang kerap kali bertindak secara frontal dalam memperjuangkan hak-hak kaum minoritas tersebut di

<sup>14</sup> *The Day I Became a Martyr: Islam Protest Brings Fatal Fatwa*, <http://www.villagevoice.com/2004-11-09/film/the-day-i-became-a-martyr-islam-protest-brings-fatal-fatwa/>, diakses pada tanggal 26 April 2010 pukul 02.26 WIB

<sup>15</sup> Dikutip dari Majalah *Sabili* No. 20 TH. XII 21 April 2005. Hal. 40

<sup>16</sup> *Euthanasia* berasal dari kata Yunani yaitu "eu"= baik dan "thanatos": mati. Maksudnya adalah mengakhiri hidup dengan cara yang mudah tanpa rasa sakit. *Euthanasia* aktif adalah : suatu tindakan mempercepat proses kematian, baik dengan memberikan suntikan maupun melepaskan alat-alat pembantu medika, seperti : melepaskan saluran zat asam, melepas alat pemacu jantung dan lain-lain. Yang termasuk tindakan mempercepat proses kematian disini adalah : jika kondisi pasien, berdasarkan ukuran dan pengalaman medis masih menunjukkan adanya harapan hidup. Tanda-tanda kehidupan masih terdapat pada penderita ketika tindakan itu dilakukan.

*Euthanasia* pasif adalah : suatu tindakan membiarkan pasien/penderita yang dalam keadaan tidak sadar (coma), karena berdasarkan pengamatan maupun ukuran medis sudah tidak ada harapan hidup, atau tanda-tanda kehidupan tidak terdapat lagi padanya, mungkin karena salah satu organ pentingnya sudah rusak atau lemah seperti : bocornya pembuluh darah yang menghubungkan ke otak (stroke) akibat tekanan darah terlalu tinggi, tidak berfungsinya jantung. Dikutip dari:

<http://www.idonbiu.com/2009/05/pengertian-euthanasia-dan-macam.html>, diakses pada tanggal 18 Maret 2010 Pukul 23.01

<sup>17</sup> *Eerbetoen aan Pim Fortuyn (19 februari 1948 - 6 mei 2002); Alles over de man die Nederland wakker schudde*, <http://www.pimfortuyn.com/asp/default.asp?t=show&var=793&tk=1>, diakses pada tanggal 18 Maret 2010 Pukul 23.23 WIB



pengadilan<sup>18</sup>. Antusiasme Van Der Graaf terhadap kaum minoritas di Belanda tersebut telah mendorongnya untuk membunuh Pim Fortuyn yang dianggapnya sebagai politisi yang menindas hak-hak kaum minoritas<sup>19</sup>.

Pemerintah Belanda sebenarnya sudah berusaha untuk mengintegrasikan *Allochtonen* tersebut ke dalam masyarakat Belanda secara penuh. Pada tanggal 30 September 1998 Pemerintah Belanda telah mengeluarkan aturan integrasi yang diberi nama *Wet Inburgering Nieuwkomers* atau Undang-undang integrasi kaum imigran yaitu sebuah aturan integrasi untuk meningkatkan perkembangan integrasi kaum minoritas dan pemberdayaan pendatang baru<sup>20</sup>.

Kebijakan ini direvisi pada tahun 2004 akibat dari masih sulitnya masyarakat muslim yang sebagian besar didominasi oleh warga keturunan Turki dan Maroko tersebut berintegrasi dengan masyarakat Belanda. Setelah terjadinya konflik-konflik antara *Allochtonen* dengan *Autochtonen* pada masa pasca pembunuhan Theo Van Gogh membuat pemerintah Belanda kembali memikirkan solusi yang tepat untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi antara *Allochtonen* dengan *Autochtonen*. Pada tahun 2006, Pemerintah Belanda melalui *Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie* atau Menteri Urusan Imigrasi dan Integrasi, Rita Verdonk, mulai mengevaluasi *Wet Inburgering Nieuwkomers* yang telah dibuat dan direvisi. Evaluasi tersebut meliputi kebijakan-kebijakan mengenai izin masuk ke negara Belanda, izin menetap, izin mencari pekerjaan, dan sebagainya semakin diperketat.

Pada tanggal 1 Januari tahun 2007 negeri Belanda resmi menetapkan kebijakan integrasi yang baru. dalam kebijakan tersebut semua calon imigran,

<sup>18</sup> Pim Fortuyn's Murderer Revealed As Immigration Enthusiast, [http://vdare.com/sailer/pim\\_fortuyn.htm](http://vdare.com/sailer/pim_fortuyn.htm), diakses pada tanggal 26 Juni 2010 pukul 22.13 WIB

<sup>19</sup> *Fortuyn killed to protect Muslims*, <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/1425944/Fortuyn-killed-to-protect-Muslims.html>, diakses pada tanggal 18 Maret 2010 Pukul 23.23

<sup>20</sup> *Factsheets Wet inburgering nieuwkomers (WIN)-NL*, <http://www.degeschiedenisvaninburgering.nl/service/serv002.html> diakses pada tanggal 1 Juni 2010 pukul 01.22 WIB

terutama yang berasal dari negara-negara Islam harus mengikuti ujian integrasi yang diadakan di Kedutaan Besar Belanda di negara asal calon imigran. Dalam ujian tersebut, para calon imigran akan diuji pengetahuannya mengenai kebudayaan masyarakat Belanda dan kemampuan mereka dalam berbahasa Belanda. Para calon imigran juga akan dipertontonkan film berdurasi 2 jam yang diproduksi untuk membantu para potensial imigran, khususnya dari negara-negara Islam, mendapatkan gambaran mengenai gaya hidup di Belanda.

Film tersebut dituangkan dalam bentuk DVD yang termasuk dalam paket bahan studi untuk ujian masuk imigran yang diadakan di kedutaan besar Belanda di negara asal kaum imigran tersebut. Peraturan tersebut diberlakukan pada tahun yang sama<sup>21</sup>. Tujuan dibuatnya film yang sebagian isinya mempertunjukkan adegan Seorang perempuan cantik bertelanjang dada sedang berjemur di pinggir pantai dan tampak pula dua pria sedang berciuman ini dimaksudkan untuk memberi pengertian kepada kaum imigran yang ingin tinggal di Belanda bahwa hal tersebut adalah normal di sini (Belanda), demikian yang diungkapkan oleh Ayaan Hirsi Ali, seorang anggota parlemen Belanda kelahiran Somalia. Pemerintah Belanda juga mengharuskan *Oudkomers* atau para imigran yang telah menetap di Belanda untuk kembali mengikuti ujian apabila kaum imigran tersebut<sup>22</sup>:

1. Tidak memiliki paspor Belanda;
2. Tidak memiliki sertifikat atau ijazah yang menunjukkan bahwa mereka menguasai Bahasa Belanda dan mengerti kebudayaan di Belanda;
3. Berusia 16-65 tahun;
4. Telah menetap di Belanda sebelum tanggal 1 Januari 2007;
5. Tinggal kurang dari 8 tahun di Belanda;

Tidak hanya sebatas pada kebijakan integrasi, pemerintah Belanda sendiri telah memperhatikan hak-hak kaum minoritas seperti hak berbicara dan berpendapat, hak berorganisasi, hak berpartisipasi dalam politik dan lain-lain yang telah dimuat

---

<sup>21</sup> *Cara Belanda Batasi Imigran*,  
<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/03/tgl/22/time/120659/idnews/563461/idkanal/10>, diakses pada tanggal 17 Februari 2010, pukul 01.44 WIB

<sup>22</sup> Institute for Multicultural Development, *Op Cit*, hal. 10

dalam Undang-undang negara Belanda. pemerintah belanda juga memberlakukan norma-norma baru dalam masyarakat. Contohnya adalah dengan larangan bagi masyarakat pendatang terutama yang berasal dari negara-negara Islam untuk melakukan tradisi-tradisi dalam agamanya yang dapat memicu kerusuhan ataupun kesalahpahaman, misalnya dengan melarang para imam untuk mempertahankan kebiasaan tidak berjabat tangan dengan wanita yang bukan anggota keluarganya karena di Belanda, tindakan tersebut dianggap tidak sopan.

## 1.2. Rumusan permasalahan

Kasus pembunuhan Theo van Gogh dan kasus pelecehan agama yang dilakukan oleh Geert Wilders hanyalah dua contoh kasus dari sekian banyak konflik yang terjadi antara masyarakat *Allochtonen* dengan *Autochtonen* di Belanda.

Konflik-konflik yang muncul tersebut semakin membuat pemerintah Belanda khawatir dengan kondisi keamanan dan sosial di negara tersebut. Oleh karena itulah pemerintah semakin memperketat aturan-aturan bagi siapapun yang ingin datang ke negara Belanda terutama bagi mereka yang ingin menetap atau mencari pekerjaan di sana.

Hal tersebut di atas menimbulkan pertanyaan yang perlu dijelaskan dalam sebuah pembuktian ilmiah dan untuk menjawab masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan pada sebuah pertanyaan:

- **Mengapa konflik-konflik tersebut bisa terjadi dan bagaimana aturan integrasi yang tertuang dalam *Wet Inburgering Nieuwkomers* yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dalam penyelesaian konflik-konflik tersebut?**

## 1.3. Tujuan penelitian

Terkait dengan latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah diungkapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas mengenai



konflik-konflik yang terjadi antara *Allochtonen* dengan *Autochtonen* serta bagaimana dampak perubahan *Wet Inburgering Nieuwkomers* yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap penyelesaian konflik-konflik tersebut.

## **1.4. Signifikasi Penelitian**

### **1.4.1. Signifikasi Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya kajian politis terutama mengenai fenomena konflik-konflik yang terjadi antara *Allochtonen* dengan *Autochtonen* serta bagaimana pemerintah Belanda mengatasi konflik-konflik tersebut.

### **1.4.2. Signifikasi Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat digunakan oleh siapapun yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai konflik-konflik antara *Allochtonen* dengan *Autochtonen* di Belanda.

## **1.5. Unit Analisis**

Unit analisis dari penelitian ini adalah *Wet Inburgering Nieuwkomers* yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1998. Adapun unit pengamatannya (*unit of observation*) adalah:

1. Sejarah kedatangan kaum imigran yang berasal dari negara-negara Islam di Belanda
2. Sosialisai politik kaum imigran asal negara-negara Islam tersebut.
3. Konflik-konflik yang muncul antara *Allochtonen* dengan *Autochtonen*
4. *Wet Inburgering Nieuwkomers* sebelum dan yang telah direvisi oleh pemerintah Belanda
5. Implikasi perubahan *Wet Inburgering Nieuwkomers* tersebut terhadap penyelesaian konflik-konflik antara *Allochtonen* dengan *Autochtonen* di Belanda

## 1.6. Kerangka pemikiran

Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk ada yang bersifat sementara misalnya wisatawan baik nasional maupun internasional dan mobilitas penduduk permanen (menetap)<sup>23</sup>. Mobilitas penduduk permanen disebut dengan migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap. Berdasarkan hal tersebut, migrasi dapat dibagi atas dua golongan yaitu Imigrasi dan Emigrasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap dan Emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain<sup>24</sup>.

Secara teoritis, motivasi melakukan migrasi berbeda-beda. Secara umum, motivasi orang melakukan migrasi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu<sup>25</sup>:

1. Dari Perspektif Individual, migrasi dipandang sebagai keputusan rasional untuk memperbaiki kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan teori *Human Capital* yang berpendapat bahwa manusia selalu berusaha mendapatkan kombinasi optimum dengan mempertimbangkan gaji, upah, jaminan pekerjaan dan sebagainya untuk memenuhi harapan hidup mereka.
2. Dari perspektif struktural, migrasi dipandang sebagai keputusan yang berkaitan dengan adanya tekanan kondisi eksternal yang dihadapi para migran seperti struktur politik, ekonomi dan lingkungan baik dalam tataran individu maupun masyarakat.

Samuel Huntington mengungkapkan bahwa gelombang migrasi yang terjadi pada abad 20 merupakan sebagian dari “produk” dekolonisasi, pendirian negara-

<sup>23</sup> *Penduduk Indonesia*, <http://syadiashare.com/penduduk-indonesia.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2010 pukul 11.39 WIB

<sup>24</sup> *What is Immigration?*, [http://edhelper.com/ReadingComprehension\\_54\\_131.html](http://edhelper.com/ReadingComprehension_54_131.html), diakses pada tanggal 26 Mei 2010 pukul 11.40 WIB

<sup>25</sup> M. Arif Nasution (Editor), *Globalisasi & Migrasi Antar Negara*, Penerbit Alumni, Bandung: 1999, hal. 43-44

negara baru, dan kebijakan-kebijakan negara yang mendorong terjadinya perpindahan penduduk. Selain itu, modernisasi teknologi dan sarana transportasi dan komunikasi yang semakin berkembang juga menjadi penyebab terjadinya arus migrasi<sup>26</sup>.

Maswadi Rauf berpendapat bahwa konflik bisa diartikan sebagai pertentangan antara paling tidak dua orang atau kelompok<sup>27</sup>. Maswadi Rauf juga mengatakan bahwa identitas primordialisme memegang peranan penting dalam terjadinya sebuah konflik. Ikatan primordialisme yang kuat dalam sebuah negara multikultur dapat menjadi sumber konflik politik apabila ada yang menyinggung identitas primordialisme mereka<sup>28</sup>.

Huntington juga berpendapat bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik akibat benturan antara dua peradaban diakibatkan karena karakteristik dan perbedaan budaya kurang bisa menyatu atau jika dikaitkan dengan konflik di Belanda adalah kebudayaan Islam dengan kebudayaan liberalisme yang dianut negeri Belanda yang saling bertolak belakang<sup>29</sup>. Huntington bahkan melihat bahwa agama merupakan aspek yang banyak berperan dalam konflik antar peradaban di masa depan. Kita seakan diingatkan bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai wacana spiritual yang menghadirkan rasa aman dan damai, tetapi juga bisa menampilkan sosoknya yang seram dan menakutkan. Agama bisa meletupkan konflik dan pertikaian ketika diinterpretasi sesuai dengan kepentingan sepihak umat atau kelompok agama.

Tadjuddin Noer Effendi mengungkapkan bahwa konflik sosial secara teoritis dapat dibagi ke dalam berbagai tipe dan bentuk yaitu konflik sosial vertikal dan konflik sosial horizontal<sup>30</sup>. Konflik sosial horizontal terjadi karena adanya perseteruan antara dua kelompok atau lebih yang disebabkan oleh alasan

<sup>26</sup>Samuel P. Huntington, *Benturan Antar peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Penerbit Qalam, Yogyakarta: Mei 2002, hal. 364

<sup>27</sup>Maswadi Rauf, *Konsensus Politik; Sebuah Penjajagan Teoritis*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 2000, hal . 2

<sup>28</sup>Maswadi Rauf, *Ibid*. Hal. 61-62

<sup>29</sup> *Mengenal benturan Peradaban: Sebuah pengantar*, <http://www.scribd.com/doc/3941974/Lanskap-Pemikiran-Samuel-Huntington-Landscape-of-Samuel-Huntington-Thought>, diakses pada tanggal 28 Juni 2010 pukul 22.31 WIB

<sup>30</sup>Agus Surata & Tuhana Taufiq Andrianto, *Atasi Konflik Etnis*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama bekerja sama dengan Gharba dan UPN “Veteran” Jogjakarta: 2001, hal. 28.

primordialisme (suku, agama, ras, golongan, etnis, dll). Selain itu konflik sosial horizontal juga terjadi antara kaum pribumi dan kaum pendatang.

Salah satu pemicu terjadinya konflik horizontal adalah sentimen antar pemeluk agama. Konflik ini dapat terjadi karena pemahaman ajaran agama yang dangkal karena makna dan pengertian mendalam tentang hakekat ajaran agama kurang dihayati dan diamalkan secara benar<sup>31</sup>.

Di lain pihak timbul pengakuan bahwa selain faktor budaya, terdapat beberapa hal yang bisa menghambat terjadinya integrasi nasional, yaitu<sup>32</sup>:

1. Minat dan pengertian masyarakat tentang kebutuhan
2. Daya serap anggota etnik terhadap perubahan
3. Adat istiadat yang kaku karena berkaitan pada kebiasaan yang sukar dirubah
4. Kekhawatiran akan hancurnya nilai-nilai dan norma-norma sosial serta keyakinan tradisional

Hal ini menurut penulis cukup relevan untuk menjelaskan mengenai penyebab konflik *Allochtonen* dengan *Autochtonen*. Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Belanda melalui kebijakan *Verzuiling* pada tahun 1970-an dan hak-hak kaum minoritas yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dianggap terlalu memberikan kebebasan bagi kaum imigran khususnya bagi kaum imigran asal Turki dan Maroko sebagai kelompok imigran muslim terbesar di Belanda sehingga mereka tidak bisa melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam kebudayaan mereka dimana kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak semuanya bisa diterima di Belanda. kedua kelompok imigran tersebut juga cenderung untuk bergaul dengan sesama kelompok mereka dibandingkan dengan warga asli Belanda karena mereka ingin mempertahankan kemurnian identitas mereka agar tidak tercemar oleh kebudayaan bangsa Belanda yang dianggap tidak cocok dengan kebudayaan mereka.

Dalam hal penyelesaian masalah imigrasi dan integrasi, Huntington berpendapat bahwa negara memegang peranan yang cukup penting dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi yaitu pemerintah pusat dalam sebuah negara sangat

<sup>31</sup> Agus Surata & Tuhana Taufiq Andrianto, *Ibid*, hal. 29.

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Integrasi Nasional Dalam Hubungan Antar Suku Bangsa Dan Sistem Nilai Budaya Nasional*, CV. Maju Jaya, Ujung Pandang: 1996, hal. 28

diperlukan dalam menangani konflik yang terjadi di negara tersebut. pemerintah pusat memiliki Hak untuk membuat sebuah peraturan yang memaksa siapapun yang tinggal dalam wilayah negaranya untuk tunduk dan patuh terhadap aturan yang telah dibuat dalam hal ini yang dimaksud adalah aturan terhadap kaum imigran<sup>33</sup>.

Huntington memberi dua contoh, contoh pertama adalah sekitar awal tahun 1990-an, kebijakan pemerintah Prancis memperketat aturan bagi anak-anak dan warga asing untuk menjadi warga negara Prancis dan aturan pemberian suaka<sup>34</sup>. Contoh kedua adalah pemerintah AS pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton pada tahun 1994 memperketat kontrol imigrasi, memperkeras kebijakan pemberian suaka dan memperluas pengawasan dan pelayanan imigrasi<sup>35</sup>.

Pada tahun 1998 pemerintah Belanda juga telah memberlakukan sebuah aturan baru yang bernama *Wet Inburgering Nieuwkomers*. Tujuan dibuatnya aturan tersebut adalah untuk memperlancar proses integrasi dan pemberdayaan pendatang baru. Melalui aturan tersebut diharapkan para imigran, khususnya yang berasal dari negara-negara Islam dapat menyesuaikan diri dengan kultur dan budaya masyarakat Belanda sehingga proses integrasi dapat berjalan dengan lancar.

Pendapat Huntington tersebut sesuai dengan model konsensus yang dikemukakan oleh Maswadi Rauf<sup>36</sup>. Maswadi Rauf berpendapat bahwa terdapat dua cara dalam penyelesaian masalah diantara pihak-pihak yang terlibat konflik. Cara yang pertama adalah penyelesaian yang didasarkan atas musyawarah yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Cara kedua adalah mencapai konsensus untuk menyelesaikan konflik yang tidak didasarkan atas perubahan pendapat dari pihak-pihak yang terlibat konflik tetapi dilakukan melalui wewenang pemerintah untuk memutuskan penyelesaian konflik secara hukum. Dalam hal ini Pemerintah mencari penyelesaian konflik yang paling tepat menurut hukum dan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>33</sup> Samuel P. Huntington, *Op Cit*, hal. 363-378

<sup>34</sup> Samuel P. Huntington, *Ibid*, hal. 372

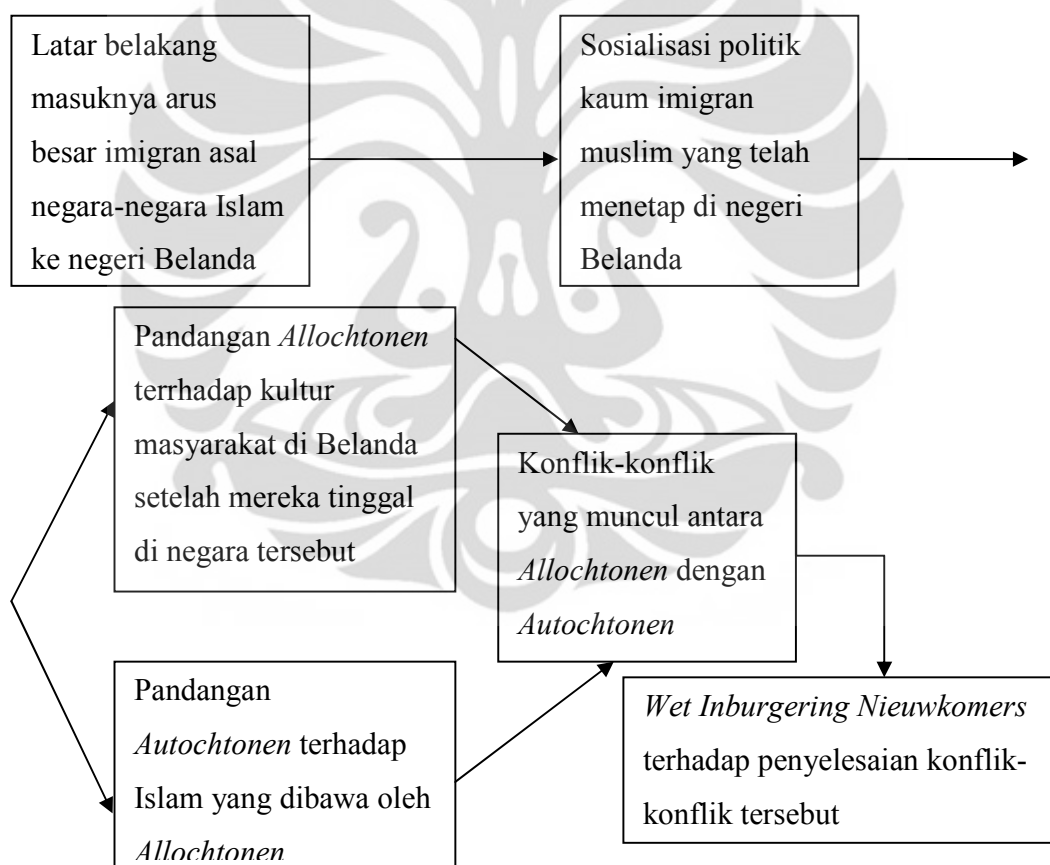
<sup>35</sup> Samuel P. Huntington, *Ibid*, hal. 373

<sup>36</sup> Maswadi Rauf, *Op Cit*, hal 17



Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Tim Puslitbang Strahan Balitbang Dephan ketika mereka ditugaskan untuk konflik horisontal yang terjadi di Maluku. Mereka memiliki pendapat bahwa peran pemerintah pusat dalam sebuah negara sangat diperlukan dalam menangani konflik yang terjadi di negara tersebut, salah satu peranan penting pemerintah pusat adalah ketika mereka menentukan kebijakan yang akan diambil dalam menangani konflik. Kebijakan penyelesaian konflik yang menyangkut seluruh kehidupan masyarakat hendaknya ditangani secara tuntas, menyeluruh, terintegrasi dan terpadu dengan melibatkan seluruh instansi/institusi serta masyarakat<sup>37</sup>.

### 1.7. Alur Berpikir



<sup>37</sup>Penanggulangan Konflik Maluku Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara kesatuan reublik Indonesia (NKRI), <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=21&mnorutisi=4>, diakses tanggal 23 Februari 2010 pukul 04.57 WIB

## 1.8. Metode penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dan landasan penelitiannya adalah studi kasus. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial<sup>38</sup>. Dengan studi kasus diharapkan dapat meneliti sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Sedangkan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah agar pada penulisan ini didapat pemahaman yang mendalam mengenai sebuah konflik etnis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kebijakan.

Dalam menjawab permasalahan yang dihadirkan diatas penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Penulis berusaha untuk menggambarkan apa yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik *Allochtonen* dengan *Autochtonen* di Belanda dan seberapa besar pengaruh perubahan *Wet Inburgering Nieuwkomers* yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi yang sesuai dan relevan dengan tema skripsi ini. Studi kepustakaan yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang diajukan berasal dari buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel dari media massa, dan data-data internet yang relevan dengan tema yang diangkat.

## 1.9. Sistematika Penulisan

Pada bab 1 akan menjelaskan tentang pendahuluan yang berisikan Latar Belakang penulisan skripsi, rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Signifikansi

---

<sup>38</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung: 2002, hal 145

Penelitian, Unit Analisis, Kerangka Pemikiran, Alur Berpikir, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 akan membahas tentang sejarah masuknya arus besar kaum imigran yang berasal dari negara-negara Islam ke Belanda agar dapat memberikan penjelasan mengenai latar belakang kedatangan kaum imigran muslim tersebut. Pada bab ini juga akan membahas mengenai sosialisasi politik kaum imigran tersebut yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai seberapa baik kemampuan kaum imigran tersebut dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan di Belanda terutama mengenai peran mereka dalam dunia politik di Belanda.

Pada bab 3 akan dijelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik antara *Allochtonen* dengan *Autochtonen* seperti bagaimana pandangan *Autochtonen* terhadap agama Islam begitu juga pandangan *Allochtonen* tersebut terhadap kultur masyarakat Belanda. pandangan kedua pihak tersebut sangat bertolak belakang sehingga memunculkan banyak konflik.

Pada bab 4 akan dibahas tentang perubahan-perubahan terhadap *Wet Inburgering Nieuwkomers* (kebijakan Integrasi) yang dilakukan pada tahun 2004 dan 2007 dan seberapa besar pengaruh perubahan-perubahan tersebut dalam penyelesaian konflik-konflik tersebut hingga tahun 2008. Bab ini juga akan membahas mengenai kelemahan-kelemahan kebijakan imigrasi sebelum terjadinya perubahan sehingga membuat proses integrasi di Belanda tidak berjalan lancar.

Bab 5 berisi tentang kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan.